

# Kesetaraan Gender dan Pergulatan Status Sosial Wanita Bali dalam Konstelasi Politik Praktis

Desak Putu Parmiti

Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

## Keyword

political education; balinese women; gender equality; practical politics

**Abstract:** This study aims to examine: the profile of Balinese women in practical political constellation, the draft model of gender-based political education, models for women in politics, scientific articles published in accredited journals. The research was analyzed by using descriptive qualitative analysis technique, and statistic analysis. The conclusions of this research, namely: (1) the role of political participation of women tends to be low. (2) The position and participation of women in political activity is highly marginalized. (3) The climate and communication patterns of family life, culture, official villages, and schools do not support the process of political education for indigenous women to achieve improvement. (4) Indigenous village as the highest symbolism in the level of indigenous peoples structurally has not done any real activity in relation to political education on women. (5) The process of forming Indonesian civil society, in relation to the objectives and characteristics of indigenous peoples of indigenous Balinese villages, is quite relevant in creating a gender equality climate.

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk melihat: profil wanita Bali dalam konstelasi politik praktis, draft model pendidikan politik yang berbasis kesetaraan gender, draft model pengarusutamaan gender bagi wanita Bali dalam bidang politik, artikel ilmiah yang terbit di jurnal terakreditasi. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif, dan analisis statistik. Simpulan dari penelitian ini, yaitu: (1) peran partisipasi politik perempuan Bali cenderung rendah. (2) Kedudukan dan peran serta kaum perempuan dalam aktivitas politik sangat termarginalkan. (3) Iklim dan pola komunikasi kehidupan keluarga, *desa adat*, *desa dinas*, dan sekolah tidak mendukung proses pendidikan politik bagi kaum perempuan Bali untuk mencapai peningkatan. (4) *Desa adat* sebagai simbolisme tertinggi dalam tataran masyarakat Bali asli, secara struktural belum melakukan aktivitas nyata dalam kaitannya dengan pendidikan politik pada kaum wanitanya. (5) Proses pembentukan masyarakat madani Indonesia, dalam hubungannya dengan tujuan dan karakteristik masyarakat *Desa Adat* Bali asli ternyata cukup relevan dalam menciptakan iklim kesetaraan gender.

## Kata kunci

pendidikan politik; wanita Bali; kesetaraan gender; politik praktis

## Alamat Korespondensi:

E-mail: dp-parmiti@undiksha.ac.id (Desak Putu Parmiti)

## Pendahuluan

Perjuangan untuk mengarusutamakan kesetaraan hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki (gender) dalam birokrasi dengan upaya mengubah kebijakan bukan hal yang mudah. Apalagi kalau hal itu menyangkut nilai-nilai tertentu agama yang diyakini sebagai kebenaran tunggal. "Saya menerima banyak ancaman dan teror, serta kemandekan karier. Tetapi, saya tidak mundur," ungkap Farisa (2006), peneliti dan anggota Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Departemen Agama dalam sebuah seminar tentang gender dalam format birokrasi. Selanjutnya dikatakan pula bahwa: "sebenarnya banyak kitab lama yang mendukung kesetaraan, tetapi itu tak pernah dimunculkan." Dengan demikian, interpretasi agama dapat dijadikan alat politik untuk melakukan dominasi terhadap kelompok tertentu.

Sejarah telah mencatat, begitu berat dan berlikunya perjuangan kaum perempuan untuk mampu "mensejajarkan diri" dengan kaum laki-laki dalam sebuah komunitas. Sejak 350 tahun sebelum masehi, Aristoteles, dalam risalahnya yang berjudul "Politik", menyatakan wanita, begitu juga anak-anak dan budak-budak tidak termasuk sebagai warga negara. Fakta ini telah terwariskan berabad-abad lamanya dalam konstelasi masyarakat, sehingga kaum perempuan tetap menjadi warga kelas dua di tengah-tengah kemajuan masyarakatnya. Kaum laki-laki yang dipertegas oleh statemen beberapa tokoh, menempatkan bahwa kaum perempuan memiliki perbedaan yang sangat tajam dalam hal ke-intelektualan (Misbah, 2000), disamping juga karena alasan fisik dan ketidakmampuan wanita untuk menyelesaikan masalah-masalah di sekitarnya.

Pintu "kesetaraan mulai terbuka" manakala sejarah soviniisme laki-laki mulai terancam, dengan lahirnya berbagai gerakan kaum perempuan yang dimulai di kawasan Amerika dan Eropa, yang akhirnya melahirkan berbagai dilema di tengah-tengah masyarakat. Di dunia Barat terdapat gerakan feminisme, yang dapat di golongkan menjadi tiga, yakni kaum feminis liberal, kaum feminis radikal, dan kaum feminis sosialis (Moraless, 2004). Tujuannya menyadarkan kaum wanita akan hak-haknya dan mereka harus menuntut emansipasi, dilakukan dengan cara menghadapi kaum laki-laki. Fokus utama dari penelitian ini adalah: pengembangan model pendidikan politik dan pengarusutamaan gender kaum wanita dalam bidang politik, khususnya bagi masyarakat pedesaan di Provinsi Bali. Terkait dengan hal tersebut, maka secara rinci, tujuan khusus dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut: (1) Mengidentifikasi, memformulasikan, dan memetakan konsep dasar pendidikan politik yang telah dan sedang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, lembaga politik, lembaga adat, dan lembaga swadaya masyarakat, baik yang bersifat terprogram maupun bersifat personal (need assesment). (2) Merumuskan dan mengintegrasikan karakteristik sosial-budaya, dan kebutuhan kaum wanita Bali dalam bidang politik, sehingga terwujud pemahaman dan kesadaran optimal pada kaum wanita pedesaan, tentang konsep dan praktek politik di wilayahnya masing-masing. (3) Mengembangkan pendekatan baru untuk pemberdayaan kaum wanita dalam bidang politik, dengan mengakomodasi eksistensi lembaga-lembaga lokal, nilai-nilai budaya masyarakat setempat, kebutuhan dan orientasi politik masyarakat setempat, dan lembaga formal pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. (4) Mengembangkan model rekayasa sosial pemberdayaan kaum wanita pedesaan dalam bidang politik, dengan pelibatan desa adat sebagai simbolisme kekuatan dan keutuhan desa adat di setiap masyarakat Hindu Bali. (5) Membangun jejaring sosial bagi pengentasan buta politik dikalangan masyarakat pedesaan di Bali, melalui sinergi potensi dan sumber daya antara dunia kampus (institusi peneliti, desa adat, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan lembaga swadaya masyarakat yang ada di masing-masing lokasi penelitian).

Pada seminar tentang: "Perempuan dalam Format Birokrasi", disimpulkan bahwa: ...selama ini hukum telah dijadikan alat untuk mendefinisikan kekuasaan kelompok-kelompok tertentu sehingga membatasi ruang gerak perempuan, tidak responsif terhadap persoalan-persoalan perempuan, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan perempuan (Sulistyowati, 2006). Isu perempuan, sangat rentan untuk dimasuki dan dijadikan isu politik karena simbolisasi politik dilekatkan pada seksualitas tubuh dan keberadaan perempuan. Bertalian dengan hal itu, Farisa (2006), seorang peneliti sosial yang fokus pada masalah-masalah perempuan, mengingatkan pentingnya pembaharuan hukum untuk "meraih kesetaraan gender", tetapi harus diwaspadai bila hukum yang dirancang sarat dengan kepentingan untuk menguasai.

Keterbukaan peran kaum perempuan dalam kontes politik, pertama kali muncul dan termaknakan dalam syariah Islam, yang menjelaskan aturan-aturan syariah mengenai kaum laki-laki dan kaum perempuan (Ansyar, 2006). Namun fakta tersebut belum bisa diterjemahkan sebagai "perlakuan kesetaraan" antara laki-laki dan perempuan dalam pentas politik. Syariah tersebut baru mencerminkan bahwa ada masalah kesetaraan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan dalam dunia politik, yang membutuhkan solusi. Menurut Ansyar (2006), pertanyaan tentang kesetaraan atau kurang seajarnya antara laki-laki dan wanita bukanlah hal yang patut untuk didiskusikan dalam dunia Islami, karena hal tersebut merupakan sebuah ekspresi yang tidak terdapat dalam perundang-undangan Islam. Bertalian dengan preposisi yang dikedepankan oleh Ansyar di atas, Farisa (2006) menyatakan bahwa persamaan antara laki-laki dan wanita dalam dunia politik, bukanlah persoalan untuk diperdebatkan, bukan juga persoalan yang merupakan subjek dalam sistem sosial Islam. Menurut Farisa (2006) wanita menjadi setara dengan laki-laki, ataupun laki-laki menjadi setara dengan wanita di mata politik, bukanlah urusan penting, yang mana telah berpengaruh kepada kehidupan sosial secara luas, dan bukan pula merupakan fenomena yang seharusnya terdapat dalam kehidupan Islam. Tapi adalah sebuah ungkapan yang hanya ada di dunia Barat. Kondisi psikologis ini, sama sekali tidak ditemukan pada komunitas muslim, kecuali bagi mereka yang meniru budaya barat, yang berarti telah melanggar hak-hak alamiah wanita itu sendiri dalam kapasitasnya sebagai manusia. Phenomena tersebut bagi sebagian kalangan penganut pola pikir barat, menyebutnya sebagai restitusi (pemulihan) hak-hak yang sebelumnya memang belum terpulihkan (Ansyar, 2006).

Sejalan dengan generalisasi mengenai kesetaraan gender dalam dunia politik sebagaimana digambarkan di atas, masyarakat Bali Age yang merupakan sebuah komunitas yang terlepas dari "trah atau keturunan emigran Majapahit" telah meyakini bahwa para wanitanya, seperti halnya dengan kaum laki-lakinya adalah komunitas yang harus selalu berpikir dan bertindak untuk kepentingan komunitas dan keyakinan hakikinya, sehingga persoalan-persoalan lainnya termasuk politik akan mengikuti dan disesuaikan dengan kondisi serta kepentingan yang mengiringi (Arga, 2003). Memperkuat fakta ini, masyarakat Bali saat ini memposisikan wanita sebagai sebuah makhluk yang sejajar dan setara di mata Sang Pencipta, sehingga wanita juga diperkenankan dan didorong untuk ikut serta dalam perpolitikan selama hal itu tidak membahayakan tugas utamanya sebagai istri dan ibu. Sejalan dengan hal ini, Islam

juga memperkenankan seorang perempuan untuk berpartisipasi dalam politik, sepanjang tidak mengabaikan tugas pokoknya sebagai pendamping suami. Dalam Islam, itu merupakan kewajiban wanita untuk menyampaikan dakwah dan melaksanakan aturan atau pemerintahan (Ansyar, 2006). Bagaimanapun kontribusi wanita menurut syariah Islam, tidaklah dapat disamakan seperti laki-laki.

## Metode

Penelitian ini dilihat dari pendekatannya menggunakan pendekatan "*Critical Ethnography Research*" dalam paradigma penelitian kualitatif (Anderson, 1989) yang mengedepankan riset sosial sebagai bentuk kritik sosial dan budaya masyarakat (Miles dan Huberman, 1992). Melalui pendekatan ini akan dibentuk relasi sistem dengan menggunakan kekuatan menganalisis dan mensintesis keterkaitan antara tindakan, pengalaman subjektif, dan kondisi sosial yang terkait langsung dengan permasalahan penelitian yaitu rekonstruksi pengarusutamaan gender dalam politik praktis dalam suatu deskripsi dan narasi yang aktual, komprehensif, kontekstual, holistik, dan bermakna. Lokasi penelitian ini adalah di Provinsi Bali, khususnya pada desa-desa adat tradisional yang ada di Provinsi Bali. Pemilihan lokasi penelitian tersebut, lebih didasarkan pada upaya pemenuhan dan komprehensivitas data terkait dengan fokus masalah penelitian, sehingga nantinya dapat dirumuskan rekonstruksi dan formulasi gender dalam konteks politik di setiap daerah penelitian, dan mencerminkan konstruk masyarakat Bali secara menyeluruh. Sesuai dengan jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dalam penelitian ini menganut prinsip "*peneliti adalah instrumen penelitian yang utama*" ((Bogdan&Taylor, 1975). Namun dalam pelaksanaannya, peneliti juga akan menggunakan beberapa alat pengumpul data bantuan. Sesuai dengan jenis pendekatan dan karakteristik penelitian, maka analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara terus menerus dari awal hingga akhir keseluruhan proses penelitian. Secara rinci proses analisis data dalam penelitian ini akan mengikutitahapan-tahapan analisis penelitian *Critical Ethnography Research* dari Carspecken (1996), yang meliputi *preliminary steps*, yaitu: (1) *compiling primary records*, (2) *preliminary reconstructive analysis*, (3) *dialogical data generation*, (4) *describing system relations*, and (5) *system relations as explanations of findings*

## Hasil dan Pembahasan

Dominasi kekuasaan dan peranan politik laki-laki dalam struktur *linggih desa tegak* dan struktur pemerintahan *Desa Adat* Bali sebagaimana yang dideskripsikan di Bab IV tidak dapat dilepaskan dari jalinan sistem nilai yang mendasari kehidupan sosial budaya masyarakat Bali sebagai masyarakat religius yang memang menganut sistem hukum dan budaya patriarkat. Ini berarti bahwa dalam realitas sosial-budaya masyarakat Bali, dominasi kaum laki-laki mendapat legitimasi yang sangat tinggi. Dominasi tersebut sangat menonjol dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam tataran keluarga, masyarakat adat, dan pemerintahan desa. Konsekuensi dari budaya patriarki yang melekat dalam kehidupan masyarakat *desa adat*, tampaknya terbawa juga dalam struktur pemerintahan desa dinas (administratif). Hal ini dapat dilihat dalam struktur pemerintahan desa dinas, dimana hanya ada 2 (dua) orang perempuan yang menduduki jabatan sebagai kepala urusan (kaur), sedangkan selebihnya diisi oleh kaum laki-laki. Realitas ini merupakan salah satu bukti, bahwa perempuan di Desa Adat Bali sangat termarginalkan dalam bidang kehidupan publik.

Dalam kitab suci Weda, secara umum tidak disebutkan adanya parameter martabat seseorang berdasarkan jenis kelamin atau kelahirannya. Sebuah mantra dalam *Rgveda* menyebutkan, "*Stri hi Brahma babhuvitha*", wanita sesungguhnya adalah seorang sarjanadan pembimbing (Rgveda VIII.33.19). selanjutnya disebut dalam *Bhagawadgita*, "*kirtih Srirvak cha narinamsritir medhadhritih kshama*." Artinya, di antara sifat-sifat wanita, aku adalah kemasyuran, kemakmuran, kehalusan budibahasa, kesenangan, kecerdasan, keteguhan hati, dan kesabaran (Bhg. X:34). Berdasarkan kitab Suci di atas jelaslah wanita mempunyai kedudukan yang terhormat.

Masyarakat *baliasli* sebagai sebuah komunitas yang otonom, memiliki pola dinamika kehidupan sosial-budaya tersendiri. Keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam struktur pemerintahan *desa adat*, merupakan suatu institusi pertama dan utama yang menjadi media bagi setiap anggota masyarakat *baliasli* dalam menegakkan kung sosial dan budayanya. Artinya, melalui institusi keluarga seseorang akan menegakkan kung sosial dan budaya masyarakatnya secara lebih luas.

Dalam kehidupan keluarga, mereka akan diperkenalkan dan dibelajarkan berbagai konsep dasar mengenai nilai, norma, dan adat istiadat yang harus dihormati dan dilaksanakan di masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang

diketengahkan oleh seorang pakar pendidikan Bali, yaitu Dantes (1989), bahwa keluarga merupakan lingkungan pertamanya dan utamabagian dalam memperoleh pendidikan kepribadian dan pendidikan sosial serta berbagai keterampilan dan keahlian yang lain.

Masyarakat *bali asli* merupakan suatu institusi adat yang bersifat otonom. Artinya, bahwa mereka memiliki aturan main dan kewenangan yang bersifat utuh dalam mengatur dan memberdayakan segala potensi yang dimiliki oleh *desa adat* itu sendiri. Warga *bali asli* sebagai sebuah komunitas yang hidup dalam tatanan budaya yang diwarnai oleh ideologi patriarki, memiliki seperangkat hak dan kewajiban. Sebagai anggota *krama desa adat*, setiap kepala keluarga (keluarga batih), berhak menikmati *tanah parumandesa*, dalam bentuk *karang paumahan*, tegalan, dan kuburan. Perolehan hak tersebut harus diimbangi dengan melaksanakan kewajiban tertentu yang dibebankan oleh *desa adat* kepada setiap warga *desa adat*.

Menurut *Awig-awig Desa Adat bali asli*, *krama desa adat* memiliki sejumlah kewajiban, yaitu mentaati segala kaidah yang diberlakukan di lingkungan *desa adat* sehingga terwujud masyarakat yang tertib berdasarkan ideologi *Tri Hita Karana*. Di dalam konteks ini tercakup beberapa dimensi, yaitu: (1) *sukerta tata pawongan*, yaitu keharmonisan hubungan antara manusia dengan manusia, (2) *sukerta tata palemahan*, yaitu keharmonisan hubungan antara manusia dengan lingkungan alam, dan (3) *sukerta tataparhyangan*, yaitu keharmonisan hubungan antara manusia dengan para desa atau Sang Pencipta.

Masyarakat *Desa Adat bali asli* sebagaimana halnya masyarakat lain di Indonesia sedang berproses secara gradual dan berkelanjutan dalam rangka membangun masyarakat Indonesia baru yaitu masyarakat madani. Seiring dengan proses reformasi di Indonesia, masyarakat Indonesia kini memasuki proses masyarakat madani. Masyarakat madani bukanlah sesuatu yang dikonsepsi atau digagas, apalagi gagasan import, melainkan sebagai dinyatakan oleh Suseno (dalam Jacob, 2000), adalah suatu masyarakat yang secara faktual, bukan normatif, dikehendaki atau dicita-citakan seiring dengan proses perubahan masyarakat Indonesia dalam gerakan masyarakat sipil (*civil society*).

Masyarakat bali asli sebagai bagian dari unit pembangunan, khususnya sebagai masyarakat pedesaan yang memiliki seperangkat potensi yang bisa dikembangkan, juga mengalami proses dan gerakan cita-cita masyarakat madani, sehingga dalam menganalisis gerakan-gerakan masyarakat sipil dalam lingkungan masyarakat Indonesia umumnya dan pada kelompok masyarakat tertentu, masalahnya bukanlah pada apakah kelompok masyarakat tersebut memahami atau memiliki konsep masyarakat madani atau apakah masyarakat tersebut setuju dengan konsep masyarakat madani, melainkan adalah adakah masyarakat madani tercermin dalam kehidupan masyarakat tersebut, sejauh mana, dan apa implikasi-implikasinya. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan proses masyarakat madani pada masyarakat bali asli akan dikaji pula masalah-masalah di atas. Ditinjau dari tujuan atau cita-cita masyarakat bali asli dan dari sendi-sendi dinamika kehidupan masyarakat mereka dalam relevansinya dengan cita-cita dan gerakan masyarakat madani Indonesia.

## Simpulan

Berdasarkan keseluruhan proses penelitian, makadi peroleh beberapa hal penting berkaitan dengan pengarusutamaan gender dalam bidang politik pada masyarakat bali asli sebagai simpulan dari penelitian ini, yaitu: (1) Dilihat dari pola komunikasi dan aktivitas kesehatan masyarakat *desa adat*, peran partisipasi politik perempuan cenderung rendah. Hal ini banyak dikonsepsi oleh penerapan ideologi patriarki, yaitu suatu ideologi kekerabatan yang menempatkan kaum laki-laki sebagai sentral kepemilikan hak dan kewajiban-kewajiban publik dalam tataran kehidupan sehari-hari, sehingga kedudukan dan status perempuan merupakan subordinasi. Kecenderungan kedudukan status dan peran perempuan yang tersubordinasi ini dapat diketahui dari proses sejarah perkembangan *Desa Adat bali asli*, kedudukan dan peran perempuan dalam struktur dan sistem pemerintahan *desa adat*. (2) Kedudukan dan peran serta kaum perempuan dalam aktivitas politik sangat termarginalkan, kecuali dalam beberapa aspek yang masih ada dalam lingkup lingkungan keluarga, sebagaimana dapat dilihat dalam makna simbolis yang adapun *mapungkus* setiap keluarga inti. Kedudukan wanita secara politis, sangat termarginalkan, baik dalam lingkup keluarga, *desa adat*, maupun aktivitas politik praktis. (3) Iklim dan pola komunikasi kehidupan keluarga, *desa adat*, *desa dinas*, dan sekolah tidak mendukung proses pendidikan politik bagi kaum perempuan bali asli untuk mencapai peningkatan. Dalam konteks ini, kaum perempuan senantiasa termarginalkan baik secara fisik maupun psikologi. Namun di tengah-tengah dilema tersebut, dapat diketahui, bahwa kaum wanita bali asli menerima marginalisasi tersebut secara sadar dan alamiah. Hal

inididakbisadilepaskandarisisistemnilaibudayamasyarakatbaliasli yang berorientasireligio-kosmossehinggamenempatkanorientasinilaipolitisperempuan paling rendahsetelahnilai-nilaireligius, sosial-ekonomis, danotonomisasiisebagaisebuahrepublik. (4) Desa adat sebagai simbolisme tertinggi dalam tataran masyarakat bali asli, secara struktural belum melakukan aktivitas nyata dalam kaitannya dengan pendidikan politik pada kaum wanitanya. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari adanya sebuah dogma patriarkhi yang memang telah melekat pada kedirian desa adat bali asli. Pada sisi lain, dalam kehidupan masyarakat bali asli, sudah mulai adanya keterbukaan, khususnya pada kaum mudanya, dimana kaum wanita telah mulai berani keluar dari patron patriarkhi, seperti dalam penentuan pilihan saat pemilu atau pemilihan kepala desa. (5) Secara permanen tidak ada perbedaan yang signifikan antar lokasi penelitian dalam kaitannya dengan model sensitisasi dan penyadaran gender, karena secara sosiologis antara desa adat bali asli memiliki kesamaan idiologis secara budaya, sehingga budaya patriarki telah menjadi bagian integral dalam aktivitas sosial dan politiknya. Namun disisi lain, dalam kaitannya dengan penguasaan sumber daya manusia, atau modalitas keluarga, kaum wanita diberikan porsi tertentu secara dominatif, seperti mengurus anak, kegiatan spiritual keluarga, menyame braya, dan kegiatan lainnya yang mendukung kekeluargaan suaminya di mata desa adat. Proses pembentukan masyarakat madani Indonesia, dalam hubungannya dengan antujuandankarakteristik masyarakat *Desa Adat* bali asli ternyata acukuprelevandala mmenciptakan iklim kesetaraan gender.

## Referensi

- Abbas, A. (2006). *Kesetaraan gender dan pergulatan sosial-ekonomi masyarakat pedesaan*. Denpasar: PT. Pustaka Bali Post.
- Anderson, B. (1989). *Imagined Community* (Komunitas-Komunitas Terbayang). Jakarta: Insist
- Ansyar, L. (2006). *Kebebasan Wanita Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah* (penerjemah: Drs. As'ad Yasin). Jakarta: Gema Insani Press.
- Ardita, G.P. (2005). *Kedudukan dan Peranan Wanita dalam Lembaga Politik. (Laporan Penelitian)*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Arga, I.M. (2003). *Perempuan Bali dan Pola Ketergantungan Politik, Citra Wanita dan Kekuasaan*. Surabaya: Obor Jaya.
- Bagus, D.G. (2001). *A Study on Customs Pertaining to Twins in Bali*. New York: Columbia University Press.
- Bawa, A. (2006). *Bali Pada Era Globalisasi Pulau Seribu Pura Tidak Seindah Penampilannya*. Yogyakarta: LkiS.
- Bae, D. J. (2002). *Gender and Politicant Participant*. USA: Open University
- Branson, G.M., dkk (ed). (2007). *Perempuan Indonesia : Dulu dan Kini*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Costa, A.T. (2003). *The Female World*. New York: The Pree Press.
- Carspecken, P.F. (1996). *Critical Ethnography in Educational Research: A Theoretical and Practical Guide*. New York and Londen: Routledge.
- Farisa, A. (2006). *Wanita Indonesia dan Kesempatan Pengembangan Karis dalam Dunia Pendidikan Tinggi*. Jogjakarta: LP3IS Press.
- Foster, Nick. (2003). "A case Study of Women Academics, Views on Equal Opportunities Career prospects and Work-Family Conflicts in A British University", *Women in Management Review*, vol 15. no.7, pp. 316-330.
- Harsiwi, T.A.M. dan B. Linggar Yekti N, (2003). *Kesetaraan Kesempatan, Prospek Karir, dan Konflik Kerja-Keluarga Akademisi Wanita pada Perguruan Tinggi Swasta di Kopertis Wilayah V Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah, (Hasil Penelitian Kajian Wanita)*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.
- Hunterwill, J. (2007). *The Grand Theory of Politic*. USA: McMilland, co.
- Ibran, T.O. (2005). *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kaler, I. G. K. (2003). *Butir-butir Tercecer tentang Adat Bali Jilid I*. Denpasar: Bali Agung.
- Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup. (2001). *Mobilitas Tenaga Kerja Wanita di Indonesia*. Jakarta
- Lasmawan, I.W. (2005). *Perempuan Malam di Kota Singaraja: Studi Eksploratif terhadap penjaja seks komersial di Kota Singaraja: (Laporan Penelitian)*. Undiksha.
- Lasmawan, I.W. (2006). *Eksistensi Wanita dalam Struktur Masyarakat Tradisional Bali. (Laporan Penelitian)*. Undiksha
- Lausiana, R. (2005), "Jobs and Gender : How are Women Doing", University Publication Office, Hongkong, didownload dari [www.cityu.edu.hk](http://www.cityu.edu.hk) pada tanggal 10 Maret 2002.

- Lubis, M.W. (2005). *"Situation of Women in Scientific Research in Australia : Equal Opportunity is Not a Strong Enough Tool"*, Melbourne, Australia.
- McTitto, C. (2005). *"Adat and Dinas: Village and State in Contemporary Bali"*. Dalam Hildred Geertz (ed), *State and society in Bali*. Leiden : KLTLY Press.